

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN 2019-2023



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SEMARANG
MENURUT PENGELUARAN
2019-2023**

<https://semarangkota.bps.go.id>



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Katalog BPS: 9302023.3374

Nomor Publikasi: 3374.24006

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xvi+73 halaman

Penyusun Naskah:
BPS KOTA SEMARANG

Penyunting:
BPS KOTA SEMARANG

Pembuat Kover:
BPS KOTA SEMARANG

Penerbit:
©BPS KOTA SEMARANG

Sumber Ilustrasi:
www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

<https://semarangkota.bps.go.id>

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SEMARANG
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Pengarah:

Fachruddin Tri Ubajani

Penanggungjawab:

Muhamad Yamani

Penyunting:

Kartikowati

Pengolah Data dan Penulis:

Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari

Penata Letak:

Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari

Infografis dan Gambar Kulit:

Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Antar Daerah, Impor Antar Daerah, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga /perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, April 2024

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG
KEPALA.



Fachruddin Tri Ubajani S.Si, M.Si

DAFTAR ISI
Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang
Menurut Pengeluaran 2019-2023

		Halaman
	Kata Pengantar	v
	Daftar Isi	vii
	Daftar Tabel	ix
	Daftar Gambar	xi
	Daftar Lampiran	xiii
	Ringkasan Eksekutif	xv
BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	5
	B. Kegunaan Statistik PDRB.....	6
BAB II	METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
	A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	11
	B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	14
	C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	16
	D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
	E. Perubahan Inventori	23
	F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	26
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2023	29
	A. Tinjauan Agregat PDRB Kota Semarang menurut Pengeluaran	31
	B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
	C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	39
	D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	40
	E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	42
	F. Perkembangan Perubahan Inventori	43
	G. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	44

	Halaman
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN
	KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2023 45
	A. PDRB (Nominal) 47
	B. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah
	Tangga terhadap Ekspor 48
	C. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB 49
	D. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB 49
	E. Perbandingan Regional PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 50
BAB V	PENUTUP 53
	LAMPIRAN 57
	DAFTAR PUSTAKA 71

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Kota Semarang (miliar rupiah), 2019-2023	31
Tabel 3.2 PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang (miliar rupiah), 2019-2023	32
Tabel 3.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kota Semarang menurut Pengeluaran (persen), 2019-2023	33
Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 Kota Semarang menurut Pengeluaran (persen), 2019-2023	35
Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019-2023	36
Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga/Tahun Kota Semarang (juta rupiah), 2019-2023	36
Tabel 3.7 Perkembangan Rata-rata Konsumsi Per-Rumah Tangga/Tahun Kota Semarang (juta rupiah), 2019-2023	37
Tabel 3.8 Perkembangan Rata-rata Konsumsi Per-Kapita/Tahun Kota Semarang (juta rupiah), 2019-2023	38
Tabel 3.9 Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kota Semarang (persen), 2019-2023	39
Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2019-2023	39
Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Semarang, 2019-2023	40
Tabel 3.12 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Per Kapita Kota Semarang, 2019-2023	41
Tabel 3.13 Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kota Semarang, 2019-2023	41
Tabel 3.14 Perkembangan Nilai dan Proporsi PMTB Kota Semarang, 2019-2023 ..	42
Tabel 3.15 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Semarang, 2019-2023	43
Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Semarang, 2019-2023	47

	Halaman
Tabel 4.2 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Semarang, Tahun 2019-2023.....	48
Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019-2023..	49
Tabel 4.4 Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Semarang, 2019-2023.....	50
Tabel 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (juta rupiah), 2021-2023	51

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran (triliun rupiah) 2019-2023	33
Gambar 2 Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019	34
Gambar 3 Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2023	34

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kota Semarang (juta rupiah), 2019-2023.....	61
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang (juta rupiah), 2019-2023	62
Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (persen), 2019-2023	63
Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019-2023	64
Lampiran 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran Kota Semarang	65
Lampiran 6 Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019-2023	66
Lampiran 7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (juta rupiah), 2021-2023	67
Lampiran 8 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (persen), 2021-2023	68

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Total nilai PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku (adhb) tahun 2023 sebesar 248,90 triliun rupiah. Terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini merupakan efek dari perbaikan ekonomi Kota Semarang yang semakin membaik pasca berlalunya pandemi Covid-19. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, terjadi pula peningkatan pada PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menjadi 161,85 triliun rupiah pada tahun 2023. Perbedaan nilai pada PDRB adhb dengan PDRB adhk terjadi disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.

Struktur perekonomian Kota Semarang dalam lima tahun terakhir tidak banyak berubah. Komponen terbesar masih aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang memberi kontribusi pada perekonomian Kota Semarang sebesar 59,68 - 70,17 persen disusul dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Konsumsi Pemerintah atau PKP menjadi komponen berikutnya yang berkontribusi dalam penyusunan PDRB pengeluaran dilanjutkan dengan konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Nilai net ekspor Kota Semarang masih menunjukkan angka negatif yang memberikan arti defisitnya kinerja perekonomian Kota Semarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan domestik yang dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar Kota Semarang dan bahkan luar negeri (impor) masih lebih besar daripada kemampuan Kota Semarang memenuhi kebutuhan produk keluar Kota Semarang dan luar negeri (ekspor).

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dari tahun 2019 - 2023 secara rata-rata mencapai 4,33 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 6,81 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 kontraksi sebesar 1,85 persen. Indeks implisit atau disebut juga sebagai indeks perkembangan mencerminkan perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen. Indeks implisit PDRB Kota Semarang tahun 2023 sebesar 153,79 memberi arti bahwa perubahan harga konsumen meningkat sebesar 53,79 persen dibandingkan tahun 2010. Indeks implisit terbesar terjadi pada komponen konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, yaitu sebesar 192,31. Dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan harga hampir 2 kali lipat pada komponen konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 92,31 persen dibandingkan tahun 2010.



PDRB KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2023

Tahun 2023 PDRB Kota Semarang mencapai Rp 248.902,61 Milyar Atas Dasar Harga Berlaku dan Rp 161.849,11 Milyar Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2023 mencapai 5,79 % dan menyumbang 14,67 % dari Total PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Rumah Tangga

PDRB ADHB

Rp 101.968,26 Milyar

PDRB ADHK

Rp 62.463,54 Milyar



PMTB

PDRB ADHB

Rp 148.552,56 Milyar

PDRB ADHK

Rp 91.911,16 Milyar

Lembaga Non Profit

PDRB ADHB

Rp 1.992,29 Milyar

PDRB ADHK

Rp 1.036,00 Milyar

Perubahan Inventori

PDRB ADHB

Rp 1.377,94 Milyar

PDRB ADHK

Rp 1.010,16 Milyar

Pemerintah

PDRB ADHB

Rp 25.578,28 Milyar

PDRB ADHK

Rp 14.152,27 Milyar



Net Ekspor

PDRB ADHB

-Rp 30.566,72 Milyar

PDRB ADHK

-Rp 8.724,02 Milyar



BAB I

PENDAHULUAN

<https://semarangkota.bppt.id>

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/*daerah/region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor - impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/*daerah/region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/*daerah/region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/*luar wilayah*.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



<https://semarangkota.bps.go.id>

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*) adalah sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi perkapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kepita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS) dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh (atas dasar harga) Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui

kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *updating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- \bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah

juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PKP adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai dan penyusutan. Untuk level Provinsi, PKP Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri dengan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut, pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut dan pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum

tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal) dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*)

- dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 - c. Perbaikan besar aset yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Metode langsung dilakukan dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini, penyediaan atau "supply" dari

barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Metode Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan metode menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Metode Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan metode tidak langsung disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).

Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas) yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*) serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan

pendaftaran khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pendaftaran untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;

- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori adh Konstan dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan

dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi, dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
KOTA SEMARANG
BERDASARKAN
PDRB PENGELUARAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2019-2023**

Perubahan struktur ekonomi Kota Semarang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 sampai dengan 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat pengaruh perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SEMARANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Semarang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyisakan pertumbuhan negatif bagi perekonomian. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, pertumbuhan perekonomian Kota Semarang selalu melebihi Provinsi Jawa Tengah, bahkan Nasional. Pada tahun 2023, Kota Semarang merupakan Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Jawa Tengah dengan total kontribusi sebesar 14,67 persen terhadap perekonomian Jawa Tengah.

Tabel 3.1 PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Kota Semarang (miliar rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	82.635,07	79.647,65	83.722,82	91.998,45	101.968,26
2. Konsumsi LNPR	1.451,05	1.437,73	1.552,82	1.779,69	1.992,29
3. Konsumsi Pemerintah	24.408,32	23.103,38	23.911,68	24.079,74	25.578,28
4. PMTB	134.265,59	124.161,15	134.726,91	140.177,37	148.552,56
5. Perubahan Inventori	1.200,25	942,29	883,62	1.233,90	1.377,94
6. Ekspor Neto	-52.608,24	-40.560,51	-39.926,86	-	-30.566,72
				31.894,93	
Total PDRB (1+2+3+4+5+6)	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.374,21	248.902,61

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Struktur Ekonomi digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (adhk) menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Tabel 3.1 menyatakan bahwa pada periode tahun 2020, nilai PDRB Kota Semarang adhb menurun sebesar 2,62 triliun rupiah menjadi 188,73 triliun rupiah. Sedangkan Pada tahun 2021, Nilai PDRB Kota Semarang berhasil berbalik arah menjadi 204,87 triliun rupiah dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 227,37 triliun rupiah. Pada tahun 2023 PDRB Kota Semarang meningkat menjadi 248,90 triliun rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 3.2 PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang (miliar rupiah), 2019-2023

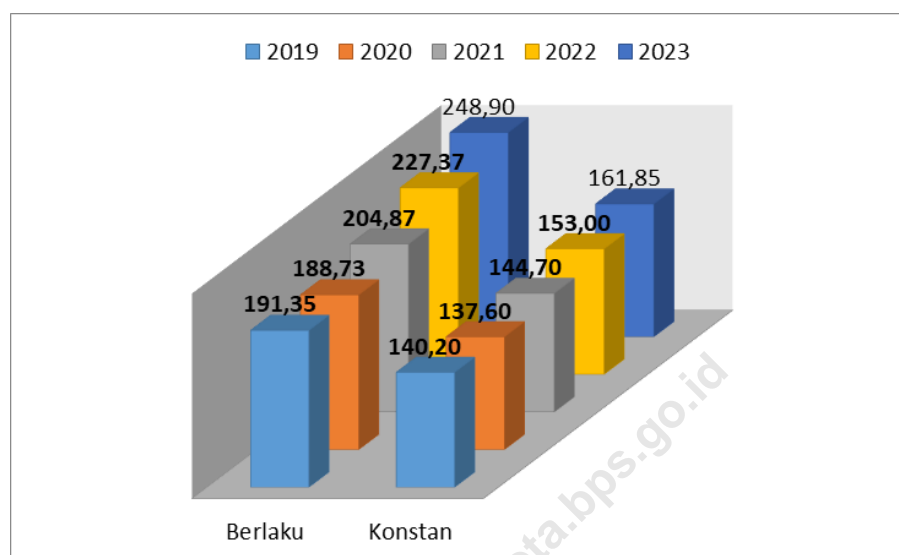
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	56.979,84	54.271,35	55.708,27	58.495,08	62.463,54
2. Konsumsi LNPRT	896,56	871,92	914,21	959,52	1.036,00
3. Konsumsi Pemerintah	14.298,74	13.597,03	13.763,06	13.800,90	14.152,27
4. PMTB	90.264,29	82.578,49	87.457,76	87.970,16	91.911,16
5. Perubahan Inventori	568,79	1.100,88	812,98	972,55	1.010,16
6. Ekspor Neto	-22.808,72	-14.817,69	-13.951,72	-9.202,80	-8.724,02
Total PDRB (1+2+3+4+5+6)	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.995,41	161.849,11

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Semarang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023.

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.



Gambar 1 Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran Kota Semarang (triliun rupiah), 2019-2023

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor neto (Net E) atau ekspor impor.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kota Semarang menurut Pengeluaran (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	43,18	42,20	40,87	40,46	40,97
2. Konsumsi LNPRT	0,76	0,76	0,76	0,78	0,80
3. Konsumsi Pemerintah	12,76	12,24	11,67	10,59	10,28
4. PMTB	70,17	65,79	65,76	61,65	59,68
5. Perubahan Inventori	0,63	0,50	0,43	0,54	0,55
6. Ekspor Neto	-27,49	-21,49	-19,49	-14,03	-12,28
Total PDRB (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

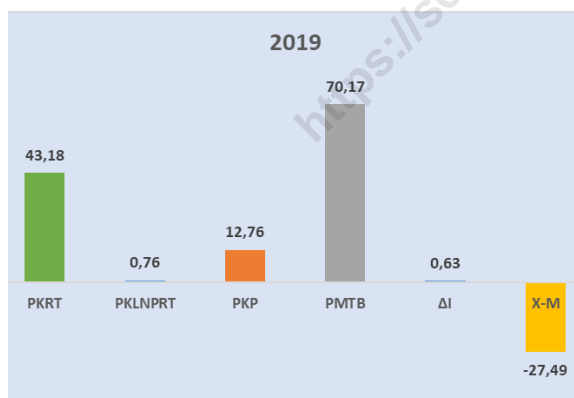
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.3 ini menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, pengeluaran untuk aktivitas PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen dominan penyusun PDRB menurut pengeluaran di Kota Semarang. Lebih dari separuh nilai PDRB Kota Semarang digunakan untuk memenuhi kebutuhan PMTB. Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa kontribusi PMTB berada pada rentang 59,68 sampai 70,17 persen. Kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) konsisten berada di peringkat berikutnya, yakni berkisar pada 40,46 sampai 43,18 persen.

Kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 10,28 – 12,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar, kurang dari 15 persen. Pada tahun 2019-2023 perdagangan Kota Semarang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kota Semarang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Komponen ekspor neto berada pada rentang -27,49 hingga -12,28 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan domestik yang dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar Kota Semarang dan bahkan luar negeri (impor) selalu lebih besar daripada kemampuan Kota Semarang memenuhi kebutuhan produk keluar Kota Semarang dan luar negeri (ekspor).



ΔI : Perubahan Inventori
X-M : Ekspor Neto

Gambar 2 Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019



Gambar 3 Distribusi PDRB Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2023

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Semarang dalam lima tahun terakhir tidak banyak berubah. Komponen terbesar masih aktivitas PMTB disusul dengan PKRT. Konsumsi Pemerintah atau PKP menjadi komponen

berikutnya yang berkontribusi dalam penyusunan PDRB pengeluaran dilanjutkan dengan konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Nilai ekspor neto Kota Semarang masih menunjukkan angka negatif yang memberikan arti defisitnya kinerja perekonomian Kota Semarang.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan riil PDRB menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Tabel 3.4 berikut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dari tahun 2019–2023 secara rata-rata mencapai 4,33 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,81 persen (2019); -1,85 persen (2020); 5,16 persen (2021); 5,73 persen (2022); dan 5,79 persen (2023). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 6,81 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,85 persen).

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Adh Konstan Tahun Dasar 2010 Kota Semarang menurut Pengeluaran (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,15	-4,75	2,65	5,00	6,78
2. Konsumsi LNPRT	12,62	-2,75	4,85	4,96	7,97
3. Konsumsi Pemerintah	4,85	-4,91	1,22	0,27	2,55
4. PMTB	4,64	-8,51	5,91	0,59	4,48
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Total PDRB	6,81	-1,85	5,16	5,73	5,79

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indikator turunan berikutnya dari nilai PDRB adalah indeks implisit. Indeks implisit atau disebut juga sebagai indeks perkembangan mencerminkan perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Indeks implisit merupakan hasil perhitungan dari nilai PDRB adhb dibandingkan dengan nilai PDRB adhk tahun berjalan. Indeks implisit PDRB Kota Semarang tahun 2023 sebesar 148,77 memberi arti bahwa perubahan harga konsumen meningkat sebesar 48,77 persen dibandingkan tahun 2010. Indeks implisit terkecil terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 157,28.

Dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan harga sekitar 1,5 kali lipat pada komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 57,28 persen dibandingkan tahun 2010.

Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	145,03	146,76	150,29	157,28	163,24
2. Konsumsi LNPR	161,85	164,89	169,85	185,48	192,31
3. Konsumsi Pemerintah	170,70	169,91	173,74	174,48	180,74
4. PMTB	148,75	150,36	154,05	159,35	161,63
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Total PDRB	136,49	137,16	141,58	148,62	153,79

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Perkembangan positif kondisi perekonomian akan mempengaruhi konsumsi akhir rumah tangga. Kondisi perekonomian yang menunjukkan tren positif diharapkan akan meningkatkan daya beli sehingga memicu peningkatan konsumsi masyarakat. Penawaran dan persediaan berbagai barang dan jasa di pasar domestik yang melimpah (termasuk yang berasal dari impor) turut berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi, salah satunya yaitu konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Semarang (miliar rupiah), 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	82.635,07	79.647,65	83.722,82	91.998,45	101.968,26
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	56.979,84	54.271,35	55.708,27	58.495,08	62.463,54
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	43,18	42,20	40,87	40,46	40,97

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perkembangan penggunaan konsumsi akhir rumah tangga Kota Semarang dapat diketahui pada tabel 3.6 Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga adhb mencapai 82,64 triliun rupiah dan 56,98 triliun rupiah untuk adhk. Nilai komponen ini mengalami penurunan karena pandemic Covid-19 menjadi 79,65 triliun rupiah secara nominal dan secara riil mencapai 54,27 triliun rupiah pada tahun 2020. Tahun 2021, komponen konsumsi rumah tangga kembali meningkat baik secara adhb maupun adhk, begitu juga di tahun 2022 dan 2023.

Proporsi PKRT terhadap PDRB adhb Kota Semarang terus menurun sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023 proporsi PKRT mengalami peningkatan. Secara rata-rata, kontribusi PKRT terhadap PDRB adhb Kota Semarang sebesar 41,54 persen.

Tabel 3.7 Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Per-Rumah Tangga/Tahun Kota Semarang (juta rupiah), 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	172,54	182,54	191,45	209,94	232,27
b. ADHK 2010	118,97	124,38	127,39	133,48	142,28
Jumlah RT (unit)	478.939	436.320	437.315	438.216	439.004

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: Proyeksi Interim BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi per rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada PDRB adhb maupun adhk dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 rata-rata konsumsi per rumah tangga sebesar 172,54 juta rupiah. Dapat diartikan bahwa setiap rumah tangga Kota Semarang pada tahun 2019 rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 172,54 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2020 rata-rata konsumsi per rumah tangga sebesar 182,54 juta dan terus meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi 232,27 juta per rumah tangga.

Tabel 3.7 juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adhb Berlaku selalu lebih besar dari nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adhk Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan

nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adh Berlaku. Dalam nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.

Tabel 3.8 Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Per-Kapita/Tahun Kota Semarang (juta rupiah), 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	45,75	48,19	50,28	54,76	60,17
b. ADHK 2010	31,54	32,84	33,46	34,81	36,86
Jumlah penduduk (org)	1.806.319	1.652.795	1.665.115	1.680.169	1.694.743

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, nilai rata-rata konsumsi per-kapita per tahun pun mengalami peningkatan yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 45,75 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kota Semarang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 45,75 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2023 rata-rata konsumsi per kapita sebesar 60,17 juta rupiah.

Peningkatan nilai rata-rata konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kota Semarang meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai. Tabel 3.8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Berlaku. Dalam nilai rata-rata konsumsi per kapita adh Konstan, pengaruh harga telah ditiadakan.

Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa apabila dilihat menurut harga konstan, secara total pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,15 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,75 persen pada tahun 2020 dan berhasil membalikkan arah pada tahun 2021 dengan tumbuh positif sebesar 2,65 persen. Pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan konsumsi rumah tangga kembali tumbuh

positif sebesar 5 persen dan 6,78 persen. Pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi per rumah tangga terjadi pada tahun 2023 sebesar 6,59 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi untuk konsumsi per kapita juga terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,87 persen.

Tabel 3.9 Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kota Semarang (persen), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total konsumsi RT	5,15	-4,75	2,65	5,00	6,78
b. Per-RT	3,53	4,55	2,41	4,79	6,59
c. Perkapita	3,98	4,09	1,89	4,06	5,87
Jumlah RT (unit)	478.939	436.320	437.315	438.216	439.004
Jumlah penduduk (org)	1.806.319	1.652.795	1.665.115	1.680.169	1.694.743

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: Proyeksi Sensus Penduduk 2020

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT, 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.451,05	1.437,73	1.552,82	1.779,69	1.992,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	896,56	871,92	914,21	959,52	1.036,00
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,76	0,76	0,76	0,78	0,80
Pertumbuhan (% ADHK)	12,62	-2,75	4,85	4,96	7,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.10 menyatakan bahwa pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun berfluktuasi. Seiring mendekati pemilihan presiden pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat mencapai 12,62 persen. Kemudian melemah menjadi -2,75 persen pada tahun 2020 karena pandemic Covid-19. Kemudian berhasil kembali menguat sebesar 4,85

persen pada tahun 2021.pada tahun 2022, konsumsi LNPRT kembali tumbuh positif yaitu sebesar 4,96 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat hingga 7,97 persen.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Semarang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adhb sebesar 24,41 triliun rupiah, terus meningkat hingga pada tahun 2023 nilainya mencapai 25,58 triliun rupiah.

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Semarang, 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	24.408,32	23.103,38	23.911,68	24.079,74	25.578,28
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	14.298,74	13.597,03	13.763,06	13.800,90	14.152,27
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	12,76	12,24	11,67	10,59	10,28

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.11 juga menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah adhk 2010 pada kurun waktu 2019 sampai 2023 sedikit berfluktuasi. Nilai total konsumsi pemerintah menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan terjadi penurunan total konsumsi pemerintah Kota Semarang, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

Menarik untuk dicermati bahwa peningkatan nilai total konsumsi pemerintah adhb yang ditunjukkan pada Tabel 3.11 tidak diikuti dengan peningkatan proporsinya. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 proporsi nilai total konsumsi pemerintah sebesar 12,76

persen, turun menjadi 12,24 pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 proporsinya sebesar 10,28 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Tabel 3.12 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Per Kapita Kota Semarang, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	13,51	13,98	14,36	14,33	15,09
b. ADHK 2010	7,92	8,23	8,27	8,21	8,35
Jumlah penduduk (org)	1.806.319	1.652.795	1.665.115	1.680.169	1.694.743

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita adhb sebesar 13,51 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023 konsumsi pemerintah adhb per kapita sebesar 15,09 juta rupiah. Sejalan dengan konsumsi pemerintah per kapita adhb, kondisi konsumsi pemerintah per kapita adhk juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 3.13 Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kota Semarang, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan ¹ (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	4,85	-4,91	1,22	0,27	2,55
b. Konsumsi perkapita	3,68	3,93	0,47	-0,62	1,66
Jumlah penduduk (org)	1.806.319	1.652.795	1.665.115	1.680.169	1.694.743

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Sumber Data Kependudukan: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.13 menunjukkan kondisi perkembangan pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara “riil” baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per kapita). Parameter ini

adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Dalam kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan total konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,85 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam hal penghematan anggaran saat pandemi Covid-19. Perkembangan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita tidak mengikuti pola yang sama dengan pertumbuhan total konsumsi pemerintah, pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan pada konsumsi perkapita. Hal ini karena terjadi penurunan jumlah penduduk yang tidak sebesar penurunan total konsumsi pemerintah.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital yang dimaksud yaitu sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 3.14 Perkembangan Nilai dan Proporsi PMTB Kota Semarang, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	134.265,59	124.161,15	134.726,91	140.177,37	148.552,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	90.264,29	82.578,49	87.457,76	87.970,16	91.911,16
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	70,17	65,79	65,76	61,65	59,68

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), pengeluaran total PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Tabel 3.14 berikut ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran total PMTB secara nominal tergambar melalui peningkatan nilai PDRB adhb komponen total PMTB. Pada tahun 2019 nilai total PMTB sebesar 134,26 triliun rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 124,16 triliun rupiah. Tahun 2021

nilai total PMTB mulai meningkat kembali menjadi 134,73 triliun rupiah. Pada tahun 2022 dan 2023 komponen total PMTB kembali meningkat masing-masing mencapai 140,18 triliun rupiah dan 148,55 triliun rupiah.

Sejalan dengan PMTB atas dasar harga berlaku, tahun 2019 nilai total PMTB adhk sebesar 90,26 triliun rupiah, kemudian turun menjadi 82,58 triliun rupiah pada tahun 2020 dan kembali meningkat mencapai 87,46 triliun rupiah pada tahun 2021 dan mencapai 87,97 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai total PMTB adhk mencapai 91,91 triliun rupiah. Meskipun nilai total PMTB selalu meningkat setiap tahunnya, kontribusi komponen ini cenderung menurun pada periode tahun 2019-2023.

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.15 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Semarang, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.200,25	942,29	883,62	1.233,90	1.377,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	568,79	1.100,88	812,98	972,55	1.010,16
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,63	0,50	0,43	0,54	0,55

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB terus berfluktuasi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Proporsi perubahan inventori Kota Semarang mengalami penurunan pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022 dan 2023, perubahan inventori Kota Semarang mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, tercatat bahwa proporsi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,43 persen.

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar Kabupaten/Kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Dalam lima tahun terakhir, net ekspor Kota Semarang selalu bernilai negatif yang berarti nilai impor antar daerah lebih besar daripada ekspor antar daerah.

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB MENURUT PENGELUARAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2019-2023**

<https://semarangkota.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Semarang, 2019 – 2023

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.374,21	248.902,61
- ADHB					
- ADHK 2010	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.995,41	161.849,11
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	105,93	114,19	123,04	135,33	146,87
- ADHK 2010	77,62	83,25	86,90	91,06	95,50
Jumlah penduduk (org)	1.806.319	1.652.795	1.665.115	1.680.169	1.694.743

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data Kependudukan: Proyeksi Sensus Penduduk 2020

PDRB perkapita Kota Semarang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sedangkan jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk 8,50 persen lebih besar dibandingkan penurunan PDRB Kota Semarang yang berkontraksi 1,85 persen. Hal ini menyebabkan PDRB perkapita Kota

Semarang tetap mengalami peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga 2023, nilai PDRB Kota Semarang, jumlah penduduk, dan PDRB perkapita tumbuh positif.

Tabel 4.2 Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Semarang, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,61	7,26	4,38	4,78	4,88
Pertumbuhan penduduk	1,13	-8,50	0,75	0,90	0,87

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan perkapita secara “riil” mengalami peningkatan di kisaran 4 – 7 persen pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Berbeda halnya dengan pertumbuhan penduduk yang rata-rata tumbuh sekitar 1,13 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,50 persen dan menjadi pertumbuhan terendah pada periode 2019 – 2023. Pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk kembali bernilai positif sebesar 0,75 persen dan kembali tumbuh positif pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,21 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk Kota Semarang sebesar 0,87 persen.

B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Dalam PDRB penggunaan Kota Semarang, konsumsi akhir rumah tangga merupakan kontributor dominan ke dua setelah PMTB. Pada tahun 2023 konsumsi akhir rumah tangga menyumbang 40,97 persen dari total perekonomian Kota Semarang. Dapat diartikan bahwa dari seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Semarang, sebesar 40,97 persen digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Semarang tersebut, sebagiannya berasal dari impor.

C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Semarang lebih besar digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto daripada untuk konsumsi akhir rumah tangga. Semakin kecil rasionya dapat diartikan bahwa PDRB Kota Semarang lebih banyak digunakan untuk investasi daripada untuk konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menjadi suatu indikasi makin membaiknya iklim investasi. Iklim investasi yang semakin baik harapannya akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019 – 2023

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	82.635,07	79.647,65	83.722,82	91.998,45	101.968,26
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	134.265,59	124.161,15	134.726,91	140.177,37	148.552,56
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	0,62	0,64	0,62	0,66	0,69

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 0,64. Hal ini memberi arti bahwa penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 0,64 kali lebih kecil dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung relatif stabil selama lima tahun terakhir.

D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pada kurun waktu 2019-2023, lebih dari 50 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kota Semarang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini mengalami tren menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2022, dari 56,70 persen pada tahun 2019 turun menjadi 55,20 persen pada tahun 2020, kemudian terus menerus turun hingga tahun 2022 sebesar 51,83 persen. Namun pada tahun 2023 proporsi ini mengalami kenaikan menjadi 52,04 persen. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan net ekspor memiliki peran yang lebih kecil daripada konsumsi akhir baik rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah, sebesar kurang dari 49 persen.

Tabel 4.4 Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Semarang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	82.635,07	79.647,65	83.722,82	91.998,45	101.968,26
b. LNPRT	1.451,05	1.437,73	1.552,82	1.779,69	1.992,29
c. Pemerintah	24.408,32	23.103,38	23.911,68	24.079,74	25.578,28
Jumlah	108.494,44	104.188,76	109.187,32	117.857,88	129.538,83
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.374,21	248.902,61
Proporsi	56,70	55,20	53,30	51,83	52,04

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

E. PERBANDINGAN REGIONAL PDRB KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang PDRB terbesar di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir. Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas ekonomi Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Pada tahun 2021 kontribusi PDRB Kota Semarang 14,42 persen dan meningkat hingga 14,57 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kontribusi Kota Semarang kembali meningkat menjadi 14,67 persen. Urutan kedua penyumbang PDRB terbesar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap, dan kemudian disusul Kabupaten Kudus, dengan rata-rata kontribusi di atas 7 persen dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Sedangkan kabupaten/kota dengan kontribusi terendah adalah Kota Magelang dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 0,65 persen dari total PDRB Jawa Tengah. Besaran kontribusi tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (miliar rupiah), 2021-2023

Kabupaten/Kota (1)	2021 (2)	2022* (3)	2023** (4)
Kabupaten Cilacap	109.653,60	121.021,80	132.425,32
Kabupaten Banyumas	56.919,82	62.817,30	68.751,65
Kabupaten Purbalingga	26.393,81	28.823,62	31.224,55
Kabupaten Banjarnegara	22.827,89	24.996,48	27.190,83
Kabupaten Kebumen	29.563,14	32.614,64	35.763,80
Kabupaten Purworejo	19.602,72	21.352,54	23.188,03
Kabupaten Wonosobo	19.856,86	21.587,23	23.329,92
Kabupaten Magelang	34.176,31	37.431,61	40.680,39
Kabupaten Boyolali	34.896,96	38.788,93	42.735,55
Kabupaten Klaten	42.271,26	46.591,61	51.274,19
Kabupaten Sukoharjo	38.990,46	42.780,63	46.521,25
Kabupaten Wonogiri	30.581,45	33.692,20	36.942,65
Kabupaten Karanganyar	39.157,21	43.087,76	47.203,55
Kabupaten Sragen	40.087,78	44.242,88	48.570,13
Kabupaten Grobogan	28.815,02	31.806,89	34.758,92
Kabupaten Blora	26.928,61	30.959,94	31.752,93
Kabupaten Rembang	20.071,10	22.107,21	24.129,71
Kabupaten Pati	45.565,94	50.119,32	54.775,41
Kabupaten Kudus	108.724,52	114.564,91	121.310,45
Kabupaten Jepara	32.045,70	35.011,08	38.023,27
Kabupaten Demak	27.649,98	30.252,47	33.016,81
Kabupaten Semarang	51.796,32	56.640,12	61.284,18
Kabupaten Temanggung	22.627,79	24.726,44	26.912,32
Kabupaten Kendal	45.164,80	49.666,32	54.360,36
Kabupaten Batang	23.125,76	25.443,55	27.886,60

Lanjutan Tabel 4.5

Kabupaten/Kota (1)	2021 (2)	2022* (3)	2023** (4)
Kabupaten Pekalongan	24.030,30	25.961,79	28.112,00
Kabupaten Pemasang	27.443,89	29.915,41	32.355,02
Kabupaten Tegal	37.334,99	40.770,33	44.440,29
Kabupaten Brebes	48.966,24	53.708,85	57.599,16
Kota Magelang	9.178,75	10.073,48	10.982,74
Kota Surakarta	50.371,56	55.848,55	60.485,76
Kota Salatiga	14.008,91	15.380,56	16.773,09
Kota Semarang	204.871,00	227.374,21	248.902,61
Kota Pekalongan	11.460,58	12.590,98	13.744,22
Kota Tegal	16.017,04	17.679,91	19.162,24
JAWA TENGAH	1.421.178,06	1.560.431,56	1.696.569,90

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

BAB V

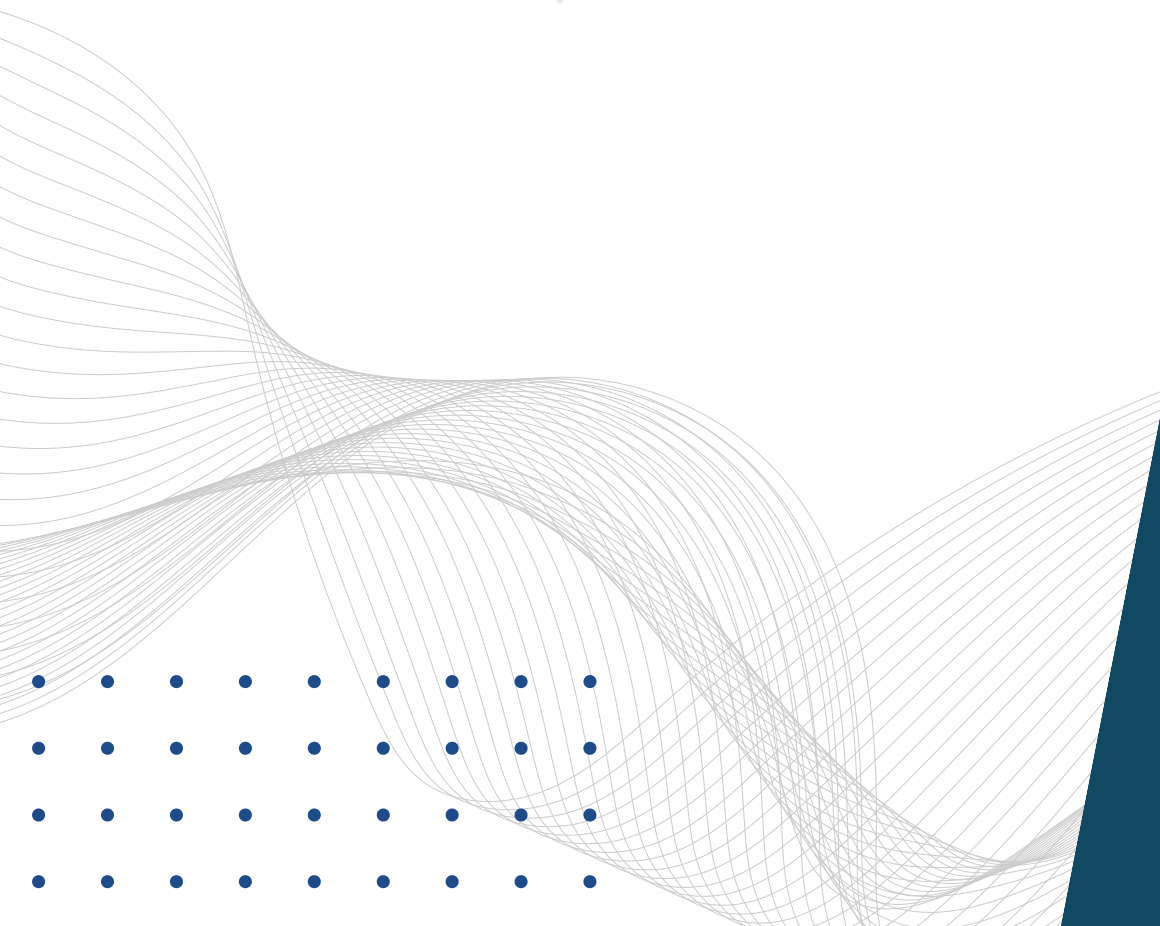
PENUTUP

<https://semarangnotas.com/id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019-2023 menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Semarang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis mengenai perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series dari tahun 2019 s.d 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Data terkait interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan dalam publikasi ini melalui Ekspor Neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan sejauh mana ketergantungan ekonomi Kota Semarang terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the region*).

LAMPIRAN

<https://semarangkota.bps.go.id>



CATATAN :

FORMAT TABEL POKOK UNTUK PDRB PENGELUARAN KAB/KOTA :

1. Pengeluaran Konsumsi
Rumah tangga

2. Pengeluaran Konsumsi
LNPR

3. Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

4. Pembentukan Modal
Tetap Bruto

5. Perubahan
Inventori

6. Net Ekspor

PDRB PENGELUARAN
(1+2+3+4+5+6)

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Semarang (miliar rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	82.635,07	79.647,65	83.722,82	91.998,45	101.968,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.451,05	1.437,73	1.552,82	1.779,69	1.992,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.408,32	23.103,38	23.911,68	24.079,74	25.578,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	134.265,59	124.161,15	134.726,91	140.177,37	148.552,56
5. Perubahan Inventori	1.200,25	942,29	883,62	1.233,90	1.377,94
6. Net Ekspor	(52.608,24)	(40.560,51)	(39.926,86)	(31.894,93)	(30.566,72)
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.374,21	248.902,61

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Semarang (miliar rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56.979,84	54.271,35	55.708,27	58.495,08	62.463,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	896,56	871,92	914,21	959,52	1.036,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.298,74	13.597,03	13.763,06	13.800,90	14.152,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	90.264,29	82.578,49	87.457,76	87.970,16	91.911,16
5. Perubahan Inventori	568,79	1.100,88	812,98	972,55	1.010,16
6. Net Ekspor	(22.808,72)	(14.817,69)	(13.951,72)	(9.202,80)	(8.724,02)
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.995,41	161.849,11

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	43,18	42,20	40,87	40,46	40,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,76	0,76	0,76	0,78	0,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,76	12,24	11,67	10,59	10,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	70,17	65,79	65,76	61,65	59,68
5. Perubahan Inventori	0,63	0,50	0,43	0,54	0,55
6. Net Ekspor	-27,49	-21,49	-19,49	-14,03	-12,28
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019-2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,15	-4,75	2,65	5,00	6,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,62	-2,75	4,85	4,96	7,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,85	-4,91	1,22	0,27	2,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,64	-8,51	5,91	0,59	4,48
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	6,81	-1,85	5,16	5,73	5,79

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Semarang, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	145,03	146,76	150,29	157,28	163,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	161,85	164,89	169,85	185,48	192,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	170,70	169,91	173,74	174,48	180,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	148,75	150,36	154,05	159,35	161,63
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	136,49	137,16	141,58	148,62	153,79

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 6 **Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Semarang (persen), 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,28	1,20	2,41	4,65	3,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,71	1,88	3,01	9,20	3,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,78	-0,46	2,25	0,43	3,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,45	1,08	2,46	3,44	1,43
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN (1+2+3+4+5+6)	2,25	0,49	3,22	4,97	3,48

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Lampiran 7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Cilacap	109.653,60	121.021,80	132.425,32
Kabupaten Banyumas	56.919,82	62.817,30	68.751,65
Kabupaten Purbalingga	26.393,81	28.823,62	31.224,55
Kabupaten Banjarnegara	22.827,89	24.996,48	27.190,83
Kabupaten Kebumen	29.563,14	32.614,64	35.763,80
Kabupaten Purworejo	19.602,72	21.352,54	23.188,03
Kabupaten Wonosobo	19.856,86	21.587,23	23.329,92
Kabupaten Magelang	34.176,31	37.431,61	40.680,39
Kabupaten Boyolali	34.896,96	38.788,93	42.735,55
Kabupaten Klaten	42.271,26	46.591,61	51.274,19
Kabupaten Sukoharjo	38.990,46	42.780,63	46.521,25
Kabupaten Wonogiri	30.581,45	33.692,20	36.942,65
Kabupaten Karanganyar	39.157,21	43.087,76	47.203,55
Kabupaten Sragen	40.087,78	44.242,88	48.570,13
Kabupaten Grobogan	28.815,02	31.806,89	34.758,92
Kabupaten Blora	26.928,61	30.959,94	31.752,93
Kabupaten Rembang	20.071,10	22.107,21	24.129,71
Kabupaten Pati	45.565,94	50.119,32	54.775,41
Kabupaten Kudus	108.724,52	114.564,91	121.310,45
Kabupaten Jepara	32.045,70	35.011,08	38.023,27
Kabupaten Demak	27.649,98	30.252,47	33.016,81
Kabupaten Semarang	51.796,32	56.640,12	61.284,18
Kabupaten Temanggung	22.627,79	24.726,44	26.912,32
Kabupaten Kendal	45.164,80	49.666,32	54.360,36
Kabupaten Batang	23.125,76	25.443,55	27.886,60

Lanjutan Lampiran 7

Kabupaten/Kota	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Pekalongan	24.030,30	25.961,79	28.112,00
Kabupaten Pemasang	27.443,89	29.915,41	32.355,02
Kabupaten Tegal	37.334,99	40.770,33	44.440,29
Kabupaten Brebes	48.966,24	53.708,85	57.599,16
Kota Magelang	9.178,75	10.073,48	10.982,74
Kota Surakarta	50.371,56	55.848,55	60.485,76
Kota Salatiga	14.008,91	15.380,56	16.773,09
Kota Semarang	204.871,00	227.374,21	248.902,61
Kota Pekalongan	11.460,58	12.590,98	13.744,22
Kota Tegal	16.017,04	17.679,91	19.162,24
JAWA TENGAH	1.421.178,06	1.560.431,56	1.696.569,90

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 8 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022*	2023**
(1)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Cilacap	7,72	7,76	7,81
Kabupaten Banyumas	4,01	4,03	4,05
Kabupaten Purbalingga	1,86	1,85	1,84
Kabupaten Banjarnegara	1,61	1,6	1,6
Kabupaten Kebumen	2,08	2,09	2,11
Kabupaten Purworejo	1,38	1,37	1,37
Kabupaten Wonosobo	1,4	1,38	1,38
Kabupaten Magelang	2,4	2,4	2,4
Kabupaten Boyolali	2,46	2,49	2,52
Kabupaten Klaten	2,97	2,99	3,02
Kabupaten Sukoharjo	2,74	2,74	2,74
Kabupaten Wonogiri	2,15	2,16	2,18
Kabupaten Karanganyar	2,76	2,76	2,78
Kabupaten Sragen	2,82	2,84	2,86
Kabupaten Grobogan	2,03	2,04	2,05
Kabupaten Blora	1,89	1,98	1,87
Kabupaten Rembang	1,41	1,42	1,42
Kabupaten Pati	3,21	3,21	3,23
Kabupaten Kudus	7,65	7,34	7,15
Kabupaten Jepara	2,25	2,24	2,24
Kabupaten Demak	1,95	1,94	1,95
Kabupaten Semarang	3,64	3,63	3,61
Kabupaten Temanggung	1,59	1,58	1,59
Kabupaten Kendal	3,18	3,18	3,2
Kabupaten Batang	1,63	1,63	1,64

Lanjutan Lampiran 8

Kabupaten/Kota	2021	2022*	2023**
(1)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pekalongan	1,69	1,66	1,66
Kabupaten Pemalang	1,93	1,92	1,91
Kabupaten Tegal	2,63	2,61	2,62
Kabupaten Brebes	3,45	3,44	3,4
Kota Magelang	0,65	0,65	0,65
Kota Surakarta	3,54	3,58	3,57
Kota Salatiga	0,99	0,99	0,99
Kota Semarang	14,42	14,57	14,67
Kota Pekalongan	0,81	0,81	0,81
Kota Tegal	1,13	1,13	1,13
JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. Badan Pusat Statistik dan *United Nations Population Fund (UNPF)*, *Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2020*, Jakarta, 2015
6. BPS Provinsi Jawa Tengah, *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
9. _____, *Jawa Tengah dalam Angka*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
13. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
14. Hardjana, A. 1994. *Orientasi Perilaku Konsumsi tentang Masalah Pangan dan Gizi dari Sumber Hayati Kelautan*. Risalah Widyakarya Pangan dan Gizi. Jakarta: LIPI.
15. Subarna, Trisna. 2012. *Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat*. Jurnal Bina Praja. Volume 4 No. 4 Desember 2012 Halaman 243 – 250.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jln. Inspeksi Kali Semarang no.1, Semarang, Jawa Tengah

Telp/ Fax: 024-3546413

E-mail: bps3374@bps.go.id

Website: <http://semarangkota.bps.go.id>

